



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Nelayan No. 116 Tlp (0426) 22412, 22094 Mamuju

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU
NOMOR :188.45/03/KPTS/I/2025/KETAPANG

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU.**
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas



H. L. SANUSI, SP, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651104 198903 1 012

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. BUPATI Mamuju di Mamuju;
2. Kepala BPKAD Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Kepala BKPP Kab. Mamuju di Mamuju ;
4. Kepala Bagian Monitoring & Evaluasi Setda Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju
 Nomor : 188.45/03/KPTS/I/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025**

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju
 Tujuan OPD : 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Ketahanan Pangan
 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan
 2. Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)
 4. Terselenggaranya Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Yang Efektif, Efisien & Berorientasi Pada Layanan Prima

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Persentase Cadangan Pangan Utama Pemerintah (Beras)	Persen	23 % (40 Ton)	0,62 x Jumlah Penduduk Kabupaten (Jiwa)	Perbadan 15/2023	ESELON II
		Pemetaan Wilayah Desa/Kelurahan Rentan dan Tahan Pangan	Desa	88	Jumlah desa/Kel. yang aman dan rentan rawan pangan	PP 17/2015 & Dokumen FSVA Diketapang	ESELON II

2.	Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	≥HPP	≥HPP	Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat produsen (petani) ≥HPP Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	PP 17/2015 & Hasil Pemantauan Harga	ESELON II
		Coefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	≤10%	≤10%	Coefisien Variabel harga pangan pokok (beras) ≤10%	PP 17/2015 & Hasil Analisis CV Harga Pangan	ESELON II
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Energi dan Protein	Persen	87	$\frac{\text{Tingkat konsumsi}}{\text{EKE (2100 kkal/kap/thn)}} \times 100 \%$	PP 17/2015 & Laporan Analisis Konsumsi Pangan	ESELON II
		Tingkat Keamanan Pangan (%)	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah Bahan Pangan yang aman}}{\text{Total Jumlah bahan pangan yang diuji}} \times 100 \%$	PP 17/2015 & Laporan Keamanan Pangan	ESELON II
4.	Terselenggaranya birokrasi Dinas Ketahanan Pangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Akip	Predikat	B	LHE Inspektorat	Inspektorat	ESELON II

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DI LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
1.	Meningkatnya penyediaan pangan yang beraneka ragam berbasis sumber daya lokal	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Persen	100	$\frac{\sum \text{Jumlah Ketersediaan kelompok bahan pangan yang dibutuhkan}}{\sum \text{Jumlah Ketersediaan kelompok bahan pangan yang tersedia}} \times 100 \%$	Permendagri 18/2020	ESELON III
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penanganan wilayah rawan pangan	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persen	100	$\frac{\sum \text{Jumlah Wilayah yang dianalisis}}{\sum \text{Total Wilayah Kabupaten}} \times 100 \%$	Permendagri 18/2020	ESELON III
3.	Meningkatnya keterjangkauan dan stabilitas harga pangan pokok	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Persen	10	$\frac{\text{CV tahun N}}{\text{CV yang ditetapkan pemerintah}} \times 100 \%$	PP 17/2015	ESELON III
4.	Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	Persen	100	$\frac{\sum \text{Protein/energi yang dikonsumsi}}{\sum \text{Protein/energi standar}} \times 100 \%$ <p>Ket : Standar Energi (2.100 Kkal/Kap/Hr) dan Protein (57 Gr/Kap/Hr) berdasarkan hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WNPG) X th. 2012</p>	Permendagri 86/2017	ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
5.	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar AsalTumbuhan	Persentase PAST yang memenuhi syarat keamanan & mutu pangan	Persen	100	$\frac{\sum \text{Sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$	Permendagri 86/2017	ES. IV / FUNGSIONAL
6.	Tersedianya Data Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan	KETAPANG	ES. IV / FUNGSIONAL
7.	Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Persentase Cadangan Pangan	Persen	23	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan yang disediakan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100 \%$	Permendagri 18/2020	ES. IV / FUNGSIONAL
8	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Permendagri 18/2020	ES. IV / FUNGSIONAL

9.	Tersedianya data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamankan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.	UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	ES. IV / FUNGSIONAL
----	--	---	---------	---	---	---	---------------------

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
10.	Terlaksananya pemantauan harga dan pasokan pangan strategis	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisa harga dan Pasokan pangan	Dokumen	1	Kondisi harga pangan tingkat konsumen dapat digunakan sebagai peringatan dini terjadinya perubahan pasokan dan permintaan selama periode tertentu. Hasil analisis dapat dijadikan sebagai bahan deteksi dini dan bahan perumusan kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran.	KETAPANG	ES. IV / FUNGSIONAL
11.	Meningkatnya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	Jumlah LDPM, LUPM dan LPM yang dikembangkan	Kelompok	6	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina pada tahun N Ket : tahun N (tahun Berjalan)	KETAPANG	ES. IV / FUNGSIONAL
12.	Tersedianya data analisis pola konsumsi pangan	Jumlah dokumen analisis konsumsi pangan	Dokumen	1	Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan	KETAPANG	ES. IV / FUNGSIONAL

					Harapan Konsumsi (PPH)		
13.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pengawasan Keamananan Pangan Segar	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah Komoditi Pangan Segar yang Aman}}{\text{Total Komoditi Pangan segar yang diawasi}} \times 100 \%$	KETAPANG	ES. IV / FUNGSIONAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
14.	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	Kelompok bahan pangan yang dihitung dalam dalam penyusunan NBM adalah Komoditas pangan strategis terdiri dari beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng sawit, cabai, bawang merah, daging sapi, daging ayam dan telur dan ikan. Kelompok bahan pangan ini merupakan kelompok penghasil energi dan protein	Data Olahan Dinas Ketahanan Pangan, Data produksi bersumber dari DTPHP	ES. IV / FUNGSIONAL
15.	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	Data Potensi Pangan	Data Olahan Dinas Ketahanan Pangan	ES. IV / FUNGSIONAL
16.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	40	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Beras Pemerintah pada tahun N}}{\text{(tahun berjalan)}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Cadangan Beras Pemerintah dikeluarkan</p>	Permentan Nomor 11 tahun 2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah	ES. IV / FUNGSIONAL

					pada saat tertentu	daerah	
17.	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	40	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah tahun N (tahun berjalan) + jumlah sisa cadangan beras tahun sebelumnya (-1)	KETAPANG	ES. IV / FUNGSIONAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
18.	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.	Permendagri 18/2020	ES. IV / FUNGSIONAL
19.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.	UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	ES. IV / FUNGSIONAL
20.	Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	1	Pemantauan di Pasar pasar besar yang ada di	Data Olahan Dinas Ketahanan	ES. IV / FUNGSIONAL

					Kabupaten Mamuju	Pangan	AL
21.	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	6	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan yang dibina	KETAPANG	ES. IV / FUNGSION AL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
22.	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	Metode analisis data menggunakan data survei secara langsung ke masyarakat di beberapa desa dan dilakukan analisis perhitungan skor PPH Konsumsi	Data Olahan Dinas Ketahanan Pangan Data-Data dukung dari OPD Terkait	ES. IV / FUNGSION AL
23.	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Pemberdayaan KWT merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Permendagri 18/2020	ES. IV / FUNGSION AL
24.	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Jumlah Rekomendasi Pengujian Sampel Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Permentan No.53/KR.040/12 /2018	ES. IV / FUNGSION AL
25.	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah layanan yang direncanakan}} \times 100$	RENSTRA PD	ESELON III

26.	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
27.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
28.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
29.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
30.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
31.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

32.	Tersedianya dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ES. IV / FUNGSIONAL
33.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln	24	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ES. IV / FUNGSIONAL
34.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ES. IV / FUNGSIONAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
35.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ES. IV / FUNGSIONAL
36.	Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
37.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
38.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

39.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
40.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
41.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
42.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
43.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
44.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
45.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

46.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
47.	Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang berkualitas	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
48.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
49.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	Ada/Tidak	RENSTRA PD	RENSTRA PD
50.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Ada/Tidak	RENSTRA PD	RENSTRA PD
51.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

52.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
53.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	DEFENISI OPERASIONAL/FORMULASI	SUMBER DATA	KET
54.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV
55.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	Ada/Tidak	RENSTRA PD	ESELON IV

56.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Ada/Tidak		RENSTRA PD
-----	--	--	------	---	-----------	--	------------

Kepala Dinas



H. LUKMAN SANUSI, SP, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 198903 1 01